

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan merupakan proses atau serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lain berisi menggerakkan, membimbing dan mengarahkan serta mengawasi orang lain dalam berbuat sama. Seorang pemimpin memegang peranan penting di dalam sebuah struktur kepemimpinan. Pemimpin adalah perekat dalam organisasi. Ia harus berpikir holistik¹ dan memegang kendali organisasi. (Tikno,2010:4)

Kepemimpinan merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kehidupan kelompok atau organisasi yang sehat, sesuai dengan tujuan pembentukan kelompok atau suatu organisasi. Kepemimpinan mengandung asas-asas pokok yang perlu ada pada diri setiap pemimpin di organisasi apapun dan pada level manapun dia berada. Maka dari itu kepemimpinan dalam pemerintahan perlu diakui keadaannya. (Umar,1997:49)

Mengingat hal-hal tersebut, penulis meneliti permasalahan kepemimpinan Bupati Masa Periode Jabatan 2013-2018 ini dapat dilihat masa baktinya setelah lebih dari dua tahun menjabat di kabupaten Bangkalan. Opini masyarakat ini mengenai masa jabatan bupati yang telah memerintah selama lebih dari dua tahun ini dapat diketahui melalui pemerintahannya. Ada pro dan kontra yang ada di benak masyarakat kecamatan Bangkalan sendiri. Dari penjelasan diatas, penelitian ini ingin melihat opini publik dari masyarakat Kecamatan Bangkalan terhadap kepemimpinan bupati termuda se-Indonesia saat ini yang menjabat pada periode 2013-2018 yang telah menjalankan tugasnya lebih dari dua tahun. Isu-isu yang kontroversial sering kali muncul karena gaya kepemimpinan bupati masa periode jabatan 2013-2018 ini kurang baik dari beberapa segi, cara memimpinnya dinilai kurang baik, kurang berkharisma, serta kurang memiliki integritas memimpin.

¹Kemampuan berpikir holistik adalah kemampuan melihat dari banyak sudut pandang, termasuk mampu melihat kemungkinan yang ada di luar sana sebagai suatu kesatuan, bukan memandang masalah secara per bagian.

Kurangnya pengalaman dari Bupati Bangkalan saat ini membuat beliau belum bisa tegas dalam mengambil keputusan, seperti yang diketahui pada siaran live di Mata Najwa yang menghadirkan beliau, yang dilontarkan kepada publik bahwa masih ditatar oleh mantan bupati terdahulu. Serta menjawab pertanyaan tidak sesuai dengan pertanyaan.

Dalam penyampaian pada beberapa kegiatan di Kecamatan Bangkalan, beliau juga belum mampu dalam public speaking. Masih belum mampu menyampaikan aspirasinya sendiri, kurang berwibawa dalam penyampaian pesan ketika tampil di depan umum.

Pada tanggal 03 Desember 2014 pemberitaan media online okezone.com, yang menyatakan “Ayah Ditangkap KPK, Bupati Bangkalan Menghilang”. Dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa keberadaan Bupati Bangkalan belum diketahui walaupun nomor telepon pribadinya aktif, namun tidak diangkat. Bupati Bangkalan dianggap bolos karena kinerjanya sejak penangkapan ayahnya oleh KPK mulai meredup. Sejak ada sang ayah, Ra Momon mampu menjalankan tugas dengan baik karena ayahnya masih ikut serta dalam kepemimpinannya.

Pada pemberitaan 06 Desember 2014 oleh liputanindonesia.co.id yang menyatakan bahwa “Ra Momon Diduga Penerus Aksi Korupsi Dinasti Bupati Bangkalan”. Masyarakat menyebut dalam pemberitaan tersebut bahwa tidak ada perbedaan atau perubahan yang berarti, masih sama saja seperti saat waktu ayahnya menjabat sebagai Bupati Bangkalan. Prioritas Titik berat Program – Program 100 hari Ra Momon menjabat sebagai Bupati Bangkalan dianggap tidak berhasil dan diduga terkait adanya penyimpangan-penyimpangan untuk anggaran dana APBD.

Pada tanggal 05 Desember 2014 pemberitaan media online beritajatim.com, yang mengatakan bahwa “KPK Temukan Air Softgun di Rumah Ra Momon” setelah penyelidikan di rumah ayah Bupati Bangkalan tersebut. Belum diketahui jika anaknya terlibat dalam kasus korupsi, tetapi masyarakat resah dengan kejadian yang menimpa ayah Bupati karena takut anaknya terlibat dalam kasus tersebut.

Pada pemberitaan radarmadura.co.id yang mengatakan bahwa “PKB Cari Bukti Keberadaan Ra Momon”. Sekretaris FPKB Hotib Marzuki mengatakan jika Bupati benar sering tidak ngantor maka pasti ada tindak selanjutnya dan yakin pimpinan fraksi juga tidak tinggal diam. Dia juga menyatakan jika berita yang di media tidak benar harus diluruskan permasalahannya tetapi jika benar harus memberi penjelasan agar tidak merusak nama baik bupati. Namun setelah ada pemberitaan di media seperti ini, Bupati langsung mendatangi kantor Dewan untuk mengklarifikasi tiga bulan ketidakhadirannya karena ada urusan kepentingan hukum. Kedatangannya memberikan penjelasan atas pernyataan PU Fraksi Demokrat, PKB, dan Hanura sebelumnya bahwa Bupati jarang ngantor.

Pada 04 Desember 2014 pemberitaan bangsaonline.com menyatakan, “KPK Bidik Bupati Ra Momon, Pasca Tangkap Fuad Amin”. Menurut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menegaskan kepada awak media bahwa Ra Momon yang kini menggantikan ayahnya menjabat Bupati Bangkalan ditengarai ikut menjadi perantara suap dari PT Media Karya Sentosa alias Media Energi. Menurut beliau bahwa anaknya bagian dari penerima (suap) kemudian akan diserahkan kepada bapaknya.

Pemberitaan Maduracorner.com pada tanggal 21 Januari 2016 yang menyatakan “Beranikah DPRD Bangkalan Tegur Bupati Yang Sering Tidak Masuk Kantor ?” kabar bolosnya bupati Bangkalan, Makmun Ibnu Fuad menjadi pembahasan dalam rapim DPRD Bangkalan. Namun, keberanian legislatif untuk memberikan teguran perlu dipertanyakan. Karena pada rapat yang tertutup tersebut tidak menghasilkan tindakan tegas.

Pemberitaan maduracorner.com pada tanggal 21 Januari 2016 yang menyatakan “Bangkalan Krisis Kepemimpinan, DPRD Disarankan Tegas dan Menempuh Jalur Resmi”. Dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa Kabupaten Bangkalan sedang mengalami krisis kepemimpinan yang berlarut-larut. Bahkan jalannya roda pemerintahan dituding sedang tidak normal. Hal tersebut dikatakan oleh mantan anggota DPRD Bangkalan, Aliman Haris kepada maduracorner.com. Menurut Aliman indikasi paling kentara adalah

seringnya Bupati Bangkalan yang dikatakan sering tidak masuk kerja. Bahkan dalam 2 bulan terakhir. “Semua sudah terlihat sejak setahun lalu. Mulai dari kasus telatnya pembayaran gaji Pasukan Kuning hingga mandeknya program-program instansi pemerintah di Bangkalan karena belum ditanda tangani bupati.” Paparnya kepada maduracorner.com.

Kepemimpinan bupati Bangkalan masa periode jabatan 2013-2018 ini telah banyak menimbulkan isu kontroversial di masyarakat. Opini publik ada karena adanya isu yang kontroversial, ketika tidak ada isu yang bertentangan tidak mungkin wacana itu dilontarkan kemasyarakat dan direspon oleh berbagai kalangan. Menurut George Carslake Thompson dalam buku Sunarjo (1997) mengemukakan bahwa publik tertentu yang menghadapi isu yang kontroversial dapat mengeluarkan reaksi yang berbeda-beda dan akan menimbulkan kondisi yang juga berbeda dimana opini tersebut berasal dari opini-opini individual yang diungkapkan oleh para anggota sebuah kelompok yang pandangannya bergantung pada pengaruh-pengaruh yang dilancarkan kelompok tersebut.

Opini publik menurut William Albiq (Santoso S.1990), opini publik adalah jumlah dari pendapat individu-individu yang diperoleh melalui perdebatan dan opini publik merupakan hasil interaksi antar individu dalam suatu publik. Emory S. Bogardus dalam *The Making of Public Opinion* mengatakan *opini publik* adalah hasil pengintegrasian pendapat berdasarkan diskusi yang dilakukan di dalam masyarakat yang demokratis. Opini publik bukan merupakan jumlah seluruh pendapat individu-individu yang dikumpulkan.

Opini publik berkembang karena pemberitaan dari media massa, meskipun ada juga opini publik yang bisa dibangun bukan dari media massa, melalui interaksi individu dengan individu yang lain (interaksi sosial), diskusi ringan antar kelompok, antar golongan sehingga menjadi opini publik, tetapi media massa mempunyai kekuatan untuk memperkuat dan mempercepat tersebarnya opini publik. Opini publik ini bisa disebabkan karena dua hal diantaranya yaitu opini yang direncanakan dan opini yang tidak direncanakan. Opini yang

direncanakan dikemukakan karena memang ada sebuah rencana tertentu yang disebarkan media massa agar menjadi opini publik. Sedangkan opini publik yang tidak direncanakan dapat muncul tak terduga karena media yang mempengaruhi keadaan dengan menyebarkan isu yang didapat tanpa mencari informasi yang lengkap sehingga menimbulkan opini publik, karena media massa lebih cepat menyalurkan informasi kepada manusia.

Kecamatan Bangkalan yang terdiri dari 13 desa/kelurahan, dengan jumlah penduduk hingga tahun 2015 sebanyak 90.525. Diantaranya ada Desa/Kelurahan Bancaran, Pejagan, Sabiyan, Gebang, Demangan, Pangeranan, Kemayoran, Mlajah, Sembilangan, Ujung Piring, Kraton, Kramat dan Martajasah. Dari Kecamatan Bangkalan ini dapat dilakukan survey, informasi dapat dikumpulkan dari responden melalui kuisisioner. Penelitian survey ini dapat mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok dari opini publik. Selain menggunakan kuisisioner, peneliti akan terjun langsung melakukan observasi langsung kepada masyarakat Kecamatan Bangkalan untuk memaksimalkan hasil penelitian.

Kecamatan Bangkalan merupakan ibukota dari Kabupaten Bangkalan dan tempat tinggal Bupati Bangkalan di Kecamatan Bangkalan. Sehingga dapat lebih mudah mengetahui informasi karena letaknya strategis. Tidak hanya itu, dengan perkembangan pembangunan di Kecamatan Bangkalan seperti pembangunan taman kota yang baru yaitu Taman Paseban dapat menambah wisatawan dan lebih mengenalkan Kecamatan Bangkalan tentunya akan menarik minat wisatawan untuk mengetahui pula siapa pemimpin Bangkalan saat ini. Sehingga dapat lebih mudah mengetahui informasi, Laju pertumbuhan di Kecamatan paling tinggi karena Kecamatan Bangkalan dinilai lebih banyak memiliki tempat hiburan sehingga masyarakat bisa memanfaatkan tempat hiburan tersebut untuk mencari penghasilan lebih.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana opini publik Kecamatan Bangkalan terhadap Kepemimpinan Bupati Bangkalan Masa Periode Jabatan 2013-2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui opini publik Kecamatan Bangkalan terhadap Kepemimpinan Bupati Bangkalan Masa Periode Jabatan 2013-2018

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak :

1.4.1 Manfaat Akademis

Dapat menambah kajian dalam penelitian tentang gaya kepemimpinan di suatu kecamatan. Di samping itu, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi suatu daerah untuk mengembangkan kepemimpinan dari seorang pemimpin karena adanya opini publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pemahaman mengenai gaya kepemimpinan dan opini publik yang berpengaruh bagi kehidupan bermasyarakat dan mengubah pola pikir masyarakat untuk bisa lebih meningkatkan kepemimpinan yang pernah ada karena masyarakat juga berpengaruh bagi kepemimpinan seseorang.